Volume 7 Nomor 2 Oktober 2026
JURNAL DUNIA PENDIDIKAN
https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JURDIP
E-ISSN: 2746-8674

Dari Rencana Pelajaran hingga CBSA: Dialektika Perkembangan Kurikulum Indonesia dalam Menghadapi Disrupsi Pendidikan

Khoirunnisaa Raya Fajrin[1], Renita Rudiana[2], Rijka Arifa Junaedi[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia
Jl. Ir H Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Email: khoirunnisaa.raya25@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak
Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Penelitian ini bertujuan meneliti perkembangan kurikulum Indonesia dari versi awal hingga munculnya prinsip pembelajaran aktif dan kurikulum adaptif penantang disrupsi pendidikan. Metode kualitatif studi pustaka digunakan untuk menguji teks, artikel ilmiah, dan kebijakan terkait. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman (reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan pergeseran dari berpusat pada guru (*teacher-centered*) menjadi berpusat pada siswa (*student-centered*), yang dimulai sejak penerapan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada Kurikulum 1984. Namun, CBSA terkendala kesiapan pedagogis guru, keterbatasan sumber daya, dan budaya belajar pasif. Menghadapi disrupsi digital, kurikulum dituntut lebih adaptif dan fleksibel. Kurikulum Merdeka hadir sebagai perpaduan kontemporer yang mengintegrasikan pembelajaran aktif, literasi digital, dan nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, amandemen kurikulum tidak boleh hanya fokus pada aspek administratif, melainkan harus memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, perbaikan lingkungan belajar, dan pembentukan budaya yang mendukung pendidikan bermakna.

Kata Kunci: Kurikulum Adaptif, CBSA, Disrupsi Pendidikan, Dialektika, Perkembangan

PENDAHULUAN

Pendidikan selalu terhubung dengan lingkungan sekitarnya dan mencerminkan perubahan politik, sosial, dan ideologi di suatu negara. Di Indonesia, kurikulum telah mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan, dimulai dari Rencana Pelajaran tahun 1947 hingga konsep Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada tahun 1980-an, mencerminkan usaha mendefinisikan identitas generasi (Alhamuddin, 2013). Secara konseptual, evolusi kurikulum berlangsung secara tidak berurutan, melainkan melalui jalur dialogis. Tiap kurikulum hadir sebagai oposisi terhadap yang lama demi menciptakan penggabungan yang baru. Rencana Pembelajaran menekankan pada kesadaran akan identitas bangsa, namun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan akan cara pengajaran yang lebih sistematis. CBSA muncul dengan menekankan siswa sebagai individu yang aktif (Wahyudiono, 2023).

Namun, permasalahan yang dihadapi oleh kurikulum sebelumnya sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Saat ini, sektor pendidikan baik di level global maupun nasional

sedang mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya teknologi digital yang luas, kecerdasan buatan, serta transformasi sosial dan ekonomi di abad ke-21 tidak hanya membutuhkan penyesuaian metode pengajaran, tetapi juga memaksa kita untuk mendefinisikan ulang makna "belajar" itu sendiri. Kelas-kelas tradisional tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, dan batas-batas lembaga pendidikan semakin kabur (Hikmawati et al., 2023).

Dalam konteks ini, melihat kembali sejarah dari Rencana Pelajaran hingga CBSA bukan hanya sekadar nostalgia. Ada kecemasan akademis yang mendasar: Bagaimana pola interaksi kurikulum yang pernah ada dapat membantu kita memahami, merespon, dan menghadapi gangguan pendidikan yang berlangsung saat ini? Sering kali, inti dari ide-ide kuno seperti kemandirian dalam berpikir di Rencana Pelajaran atau peran aktif siswa dalam CBSA justru menjadi dasar yang dicari kembali dalam konsep pendidikan masa kini, seperti apa Kurikulum Merdeka atau pembelajaran berbasis digital (Mansur et al., 2025).

Artikel jurnal ini bertujuan menganalisis suatu perkembangan kurikulum di Indonesia dari Rencana Pelajaran hingga CBSA, serta tantangan era disrupsi. Pendekatan historis dan filosofis digunakan untuk memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan dan akademisi. Penting untuk memahami dinamika masa lalu agar perubahan kurikulum mendatang terencana dan berkelanjutan (Aziza, 2024).

Kurikulum sebagai landasan utama dalam pendidikan sekolah harus menghadapi tuntutan untuk mempersiapkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta ketahanan emosional dan karakter yang baik. Namun, seringkali terjadi bahwa perubahan kurikulum di Indonesia maupun negara lain lebih berfokus pada aspek administratif atau kebijakan publik, sementara dimensi filosofis (apa yang dianggap sebagai ilmu; bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya) kurang mendapat perhatian yang memadai. Belakangan ini, kita sering mendengar istilah "Era Disrupsi. " Apa sebenarnya yang dimaksud dengan "era disrupsi"? Era disrupsi dicirikan oleh kemajuan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta perubahan sosial ekonomi yang cepat dan pergeseran nilai-nilai. Era Disrupsi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan (Zaimarni et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka untuk mengkaji perubahan kurikulum di Indonesia mulai dari era Rencana Pelajaran hingga masa Cara Belajar Siswa Aktif sebagai respons terhadap gangguan dalam dunia pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang teratur melalui pencarian digital di beberapa basis data jurnal ilmiah berkualitas, termasuk Google Scholar, SINTA dari Sinta 2 hingga Sinta 4, dan Scopus. Strategi untuk mencari literatur memanfaatkan kombinasi kata kunci seperti "sejarah kurikulum di Indonesia", "Rencana Pelajaran 1957", "Kurikulum 1984 CBSA", "gangguan pendidikan", dan "transformasi kurikulum". Dengan menggunakan database tersebut, peneliti mampu melacak pergeseran paradigma kurikulum secara urut waktu dan juga menilai keterkaitannya dengan tantangan pendidikan saat ini (Paul & Rialp, 2020).

Untuk mempertahankan tingkat kualitas dan relevansi dari penelitian, peneliti menerapkan standar ketat dalam memilih literatur yang sesuai. Kriteria utama untuk inklusi mensyaratkan bahwa artikel harus berasal dari jurnal akademis yang kredibel, buku referensi tentang sejarah pendidikan, atau dokumen kebijakan resmi pemerintah yang secara spesifik membahas elemen kurikulum dari era klasik (1957–1994) dan era modern. Batasan tahun untuk publikasi sumber ditetapkan maksimum 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 hingga 2026, supaya analisis sejarah yang dilakukan tetap relevan dalam konteks diskursus saat ini (pembahasan tentang disrupsi di abad ke-21). Di sisi lain, kriteria eksklusi diterapkan untuk artikel opini umum yang tidak memiliki sitasi yang memadai, prosiding yang tidak terindeks, dan kajian yang tidak menggali dinamika perubahan kurikulum secara mendalam (Kerres & Bedenlier, n.d.).

Berdasarkan hasil pencarian awal, ditemukan sebanyak 45 artikel yang sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Setelah melalui proses penyaringan dengan membaca abstrak dan menilai kesesuaian terhadap kriteria inklusi, terpilih 22 referensi utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini secara mendalam. Referensi yang dipilih mencakup 15 artikel jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, 4 artikel jurnal internasional dengan reputasi baik, dan 3 dokumen kebijakan yang bersifat historis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis mengunakan metode analisis isi, termasuk dalam tahap pengurangan data, penyajian data secara tematik, serta pengambilan kesimpulan mengenai pola dialektika dan kesinambungan di antara berbagai era kurikulum yang ada di Indonesia (Miles et al., n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, ditemukan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era digital saat ini, kurikulum mengalami berbagai perubahan yang menunjukkan adanya pergeseran orientasi pendidikan dari model yang berpusat pada guru menuju model yang lebih berpusat pada peserta didik. Perubahan tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pada setiap zamannya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum Indonesia dapat dipahami melalui empat fase utama. Fase pertama ditandai oleh kurikulum tradisional yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa dan pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan secara terpusat. Fase kedua ditandai dengan munculnya Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang membawa perubahan paradigma pembelajaran menuju keterlibatan peserta didik yang lebih aktif. Fase ketiga memperlihatkan munculnya berbagai tantangan akibat disrupsi teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat yang mendorong transformasi sistem pendidikan. Sementara itu, fase keempat menunjukkan kecenderungan menuju kurikulum yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap kurikulum lahir dalam konteks yang berbeda, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh proses perkembangannya, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum Indonesia tidak berlangsung secara terputus, melainkan melalui proses perubahan yang berkesinambungan sebagai respons terhadap berbagai tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Tabel 1. Dinamika Evolusi Kurikulum (Model Komparatif Lajur)

Fase Perkembangan	Karakteristik Utama	Orientasi Target	Pola Pendekatan
Fase	Kurikulum Tradisional	Pembentukan karakter bangsa	Berpusat pada otoritas terpusat (Sentralistik)
Fase	Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA)	Peningkatan keterlibatan peserta didik	Bergeser menuju keaktifan siswa (*Active learning*)
Fase	Transformasi Pendidikan	Menjawab tantangan disrupsi teknologi	Penyesuaian sistem terhadap kebutuhan masyarakat
Fase	Kurikulum Adaptif	Responsif terhadap era digital dan zaman	Mengutamakan fleksibilitas dan adaptabilitas
Benang Merah	Relevansi & Kualitas: Seluruh fase diikat oleh satu tujuan esensial, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang berkesinambungan dan relevan bagi siswa.		

Pembahasan

Setelah meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dalam menciptakan sistem pendidikan nasional yang dapat memperkuat jati diri bangsa dan membentuk karakter masyarakat yang merdeka. Pendidikan dilihat sebagai sarana penting dalam pembangunan negara, karena melalui pendidikan, bangsa ini dapat menanamkan nilai-nilai seperti nasionalisme, patriotisme, dan ideologi nasional kepada generasi muda (Anam & Solihah, 2024).

Dengan latar belakang tersebut, kurikulum 1947, yang dikenal sebagai "Rentjana Pelajaran 1947," lahir sebagai kurikulum pertama Indonesia sesudah kemerdekaan dan menjadi landasan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Rencana pembelajaran ini dibuat sebagai jawaban terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda, yang lebih mengutamakan kepentingan para penjajah dibandingkan dengan kemajuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, fokus pendidikan mulai berpaling kepada pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, dan pemahaman mendalam tentang identitas nasional (Hasibuan et al., 2024).

Kurikulum 1947, dalam pelaksanaannya, menekankan pendidikan karakter, kesadaran nasional, dan perkembangan moral warga negara Indonesia. Pendidikan pada periode ini tidak hanya memperhatikan sisi intelektual tetapi juga pada pembentukan

kepribadian dan pembentukan identitas nasional (Khasbiyah & Apriyani, 2025). Mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, sejarah nasional, dan kewarganegaraan diberi posisi penting sebagai sarana untuk menumbuhkan patriotisme dan memperkuat kesadaran nasional (Sulmi & Bahri, 2025).

Secara struktural, kurikulum 1947 masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial, khususnya dalam organisasi mata pelajaran yang terpusat dan metode pengajarannya. Namun, isi kurikulum mulai mengalami transformasi mendasar dengan memasukkan nilai-nilai dan ideologi nasional ke dalam materi pembelajaran (Anam & Solihah, 2024). Pendidikan tidak lagi hanya tentang melatih administrator, seperti pada era kolonial, tetapi tentang menumbuhkan warga negara yang sadar akan identitas nasional mereka.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada kurikulum tahun 1952, yang dikenal sebagai "Rencana Kurikulum Terperinci 1952". Kurikulum ini memperbaiki kurikulum tahun 1947 dan memberikan penekanan sistematis pada tujuan pembelajaran. Pemerintah mulai mengembangkan materi pengajaran yang lebih terfokus dan terperinci untuk mewujudkan proses pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Lebih lanjut, pembelajaran menjadi terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan pendidikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga kontekstual dan dapat diterapkan bagi siswa (Anam & Solihah, 2024).

Selama periode ini, pendidikan semakin dipandang sebagai sarana untuk membentuk identitas nasional. Nilai-nilai seperti nasionalisme, kerja sama timbal balik, disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas kepada negara menjadi elemen integral dari proses pembelajaran di sekolah. Guru memainkan peran strategis sebagai agen negara, bertugas menanamkan ideologi nasional pada siswa melalui pembelajaran dan kebiasaan sosial di lingkungan sekolah (Khasbiyah & Apriyani, 2025).

Dengan munculnya era demokrasi yang dipimpin pada awal tahun 1960-an, arah pendidikan nasional semakin dipengaruhi oleh politik nasional dan tren ideologis. Hal ini jelas tercermin dalam kurikulum 1964, yang memperkenalkan konsep "Pancawardena," yang bertujuan mengembangkan kemampuan moral, intelektual, emosional, dan artistik siswa, serta keterampilan, dan kemampuan fisik (Sulmi & Bahri, 2025). Konsep ini

bertujuan untuk membina seluruh bangsa Indonesia, sejalan dengan visi politik pemerintahan Presiden Sukarno pada era demokrasi yang dipimpin.

Kurikulum 1964 menunjukkan transformasi pendidikan menjadi instrumen ideologis negara. Pengaruh konsep Manipol-USDEK (Dewan Pendidikan Terpadu Indonesia) dan NASAKOM (Dewan Pendidikan Terpadu Indonesia) mulai meresap ke dalam kebijakan pendidikan nasional, dan sekolah mulai berfungsi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai alat sosialisasi ideologi nasional (Subkhan, 2018). Mata pelajaran sejarah dan kewarganegaraan digunakan untuk membangun legitimasi politik pemerintah sekaligus membentuk memori kolektif bangsa sesuai dengan arah kekuasaan negara (Sulmi & Bahri, 2025).

Reformasi kurikulum dari tahun 1947 hingga 1964 menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia terkait erat dengan proyek pembangunan bangsa sejak awal. Kurikulum berfungsi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pendidikan, tetapi juga berperan dalam membangun identitas bangsa, menguatkan kesadaran nasional, dan menginternalisasi ideologi nasional di kalangan generasi muda Indonesia. Perubahan kurikulum selama periode ini juga menunjukkan bahwa pendidikan terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan ideologis yang terjadi di dalam negara (Putra et al., 2026).

Dari tahap awal kemerdekaan hingga era demokrasi yang dipimpin, sistem pendidikan Indonesia berkembang dalam paradigma yang sangat tersentralisasi. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kebijakan pendidikan, mulai dari pengembangan kurikulum dan tujuan pendidikan hingga materi pengajaran dan bahkan metode pengajaran di sekolah (Putra et al., 2026). Paradigma tersentralisasi ini muncul sebagai upaya nasional untuk mempromosikan persatuan nasional dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, yang dicirikan oleh latar belakang budaya, bahasa, agama, dan sosial yang kaya.

Dalam paradigma sentralisasi, pendidikan dipandang sebagai alat negara untuk menumbuhkan kesadaran nasional yang terpadu. Pemerintah menggunakan sekolah sebagai sarana untuk menanamkan ideologi Pancasila, nasionalisme, patriotisme, dan loyalitas kepada negara. Oleh karena itu, kurikulum dirancang secara terpusat,

memastikan bahwa semua sekolah di Indonesia memiliki kebijakan pendidikan yang sama yang selaras dengan visi politik negara (Anam & Solihah, 2024).

Di era demokrasi yang dipimpin, pendidikan diarahkan untuk mendukung konsep Manipol USDEK dan Nasakom, ideologi politik negara. Kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk membentuk kesadaran nasional sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dan sejarah nasional merupakan sarana utama untuk meningkatkan kesadaran politik dan menumbuhkan loyalitas siswa kepada negara dan pemerintah.

Dari perspektif pedagogi kritis, pendidikan tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan ideologis tertentu. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan, melalui sistem pendidikannya, nilai-nilai, norma, dan pengetahuan apa yang dianggap valid. Oleh karena itu, kurikulum sering kali mencerminkan kepentingan politik rezim (Subkhan, 2018).

Di sisi lain, paradigma sentralisasi juga memiliki dampak positif dalam konteks membangun kesadaran nasional pada tahap awal kemerdekaan. Sistem pendidikan yang tersentralisasi secara efektif memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, menumbuhkan rasa persatuan, dan menanamkan nilai-nilai nasional pada masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang budaya (Hasibuan et al., 2024). Pendidikan menjadi sarana penting integrasi nasional dalam menjaga integritas Indonesia yang baru merdeka.

Sistem pendidikan regional yang terpusat juga menciptakan berbagai keterbatasan. Kurikulum yang seragam tidak memperhitungkan kebutuhan lokal dan keragaman budaya regional. Guru hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat tanpa fleksibilitas untuk mengembangkan program sesuai dengan kondisi siswa di setiap wilayah (Putra et al., 2026). Akibatnya, pendidikan lebih berorientasi pada kepentingan negara daripada pengembangan kreativitas, kemandirian, dan potensi individu siswa.

CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang diperkenalkan dalam Kurikulum 1984 adalah suatu bentuk perlawanan terhadap metode pengajaran tradisional yang berfokus pada guru. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan, bukan hanya sebagai penerima informasi. CBSA menunjukkan perubahan cara pandang dari proses pengalihan pengetahuan menjadi proses pembentukan

pengetahuan. Siswa diperintahkan untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan menemukan konsep dengan cara mereka sendiri, sehingga pembelajaran tidak lagi menekankan pada menghafal, tetapi pada pemahaman dan pengalaman belajar yang bermakna (Mulyasa, 2012).

Konsep CBSA berkaitan erat dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Pengetahuan tidak ditransmisikan secara langsung oleh guru, melainkan dibangun melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, siswa diharapkan untuk secara aktif mengeksplorasi, menemukan, dan memahami konsep, dengan guru bertindak sebagai mitra dalam proses pembelajaran (Harahap et al., 2023).

Selain Piaget, gagasan CBSA sejalan dengan perspektif Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Melalui konsep Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), Vygotsky menyatakan bahwa murid dapat mencapai potensi terbaik mereka berkat bantuan dari guru dan rekan sebaya. Dalam pendekatan ini, proses belajar terjadi melalui percakapan, debat, dan kolaborasi, sementara guru menyediakan scaffolding agar siswa bisa belajar secara mandiri (Rusman, 2017). Gagasan "aktif" dalam CBSA seringkali dipahami salah sebagai kelas yang penuh keramaian tanpa tujuan pembelajaran yang jelas. Hal ini menyebabkan proses belajar menjadi kurang teratur dan tidak efisien dalam membangun pemahaman siswa. Kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas dan media pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar siswa (Sanjaya, 2006).

Budaya belajar yang masih sama menjadi hambatan dalam penerapan CBSA. Siswa yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran yang pasif sering kali mengalami kesulitan saat harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang memerlukan keterlibatan aktif. Situasi ini mencerminkan adanya celah implementasi, yaitu perbedaan antara rancangan kurikulum dan praktik yang terjadi di lapangan. Perubahan cara pandang dalam CBSA juga berdampak pada fungsi guru. Jika sebelumnya guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama (pengajaran yang berfokus pada guru), maka dalam CBSA, mereka berfungsi sebagai pemfasilitasi, mediator, dan pemberi semangat. Guru tidak lagi menjadi penguasa dalam proses pembelajaran, melainkan menciptakan suasana belajar yang memungkinkan siswa untuk aktif mengembangkan pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial (Sardiman, 2011).

Sebagai mediator, guru membantu mengarahkan diskusi, meluruskan miskonsepsi, serta memberikan scaffolding agar siswa mencapai pemahaman yang lebih baik. Selain itu, guru juga berperan sebagai motivator yang menumbuhkan minat belajar siswa melalui suasana belajar yang menyenangkan dan kontekstual. Dengan demikian, CBSA menuntut kompetensi pedagogik guru yang lebih kompleks dalam merancang pembelajaran yang eksploratif, kolaboratif, dan reflektif (Rusman, 2017).

Pembelajaran interaktif dengan pendekatan CBSA menawarkan sejumlah keuntungan, seperti meningkatkan pengetahuan tentang konsep serta kemampuan berpikir analitis di antara para siswa. Saat siswa berpartisipasi langsung dalam proses pembelajaran, mereka cenderung lebih mudah dalam memahami dan mengingat materi dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Pendekatan pembelajaran interaktif juga memotivasi peserta didik diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengkaji, dan menemukan solusi secara mandiri. Beberapa studi menunjukkan bahwa pembelajaran interaktif memberikan dampak positif yang signifikan pada hasil belajar siswa, sehingga metode ini layak diterapkan dalam sistem pendidikan saat ini (Sudiana & Putrayasa, 2024).

Perubahan pandangan siswa terhadap otoritas guru di zaman now adalah fenomena sosial yang rumit dan mencerminkan perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan. Perubahan ini bukan hanya disebabkan oleh kemajuan teknologi atau modifikasi kurikulum, tetapi juga merupakan hasil dari evolusi budaya belajar, dinamika keluarga modern, serta interakasi siswa dengan berbagai sumber pengetahuan. Di zaman digital ini, siswa tidak lagi sepenuhnya mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Aksses terhadap materi pembelajaran daring seperti video, zoom, dan kecerdasan buatan telah memposisikan guru tidak lain lagi sebagai "sumber pengetahuan utama" akan tetapi melainkan sebagai fasilitator dan pemandu cara berpikir, transformasi ini mengharuskan guru untuk terus meningkatkan kemampuan agar tetap memiliki legitimasi profesional di tengah derasnya informasi yang tersedia (Pohan et al., 2025).

Perubahan dan perkembangan kurikulum di suatu negara, termasuk Indonesia, merupakan hal yang pasti dan selalu terjadi sesuai dengan sunnatullah. Mengapa hal ini terjadi? Karena perubahan adalah hal yang tidak terhindarkan di dunia ini. Selama masyarakat mengalami transformasi, kurikulum juga akan mengalami perubahan, pergantian menteri tidak ada hubungannya dengan perubahan kurikulum; ada siklus

perubahan yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum. Dengan logika tersebut, diperlukan waktu yang panjang untuk mengembangkan kurikulum, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Perubahan kurikulum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, baik lokal maupun global, termasuk tuntutan yang muncul akibat perkembangan zaman yang lebih maju (Fauzan & Arifin, 2022).

Kurikulum di zaman disrupsi seharusnya melihat pada ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak tetap, melainkan bersifat dinamis, lintas disiplin, dan terhubung pada teknologi. Kurikulum itu tidak seharusnya hanya menitikberatkan terhadap fakta-fakta, tetapi juga harus mengembangkan suatu kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kecerdasan emosional dan sosial (Zaimarni et al., 2025).

Kurikulum seharusnya tidak hanya fokus pada fakta-fakta saja, tetapi juga perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan literasi digital, serta kecerdasan emosional dan sosial. Kenyataan tentang pengetahuan dalam kurikulum perlu diperluas: tidak hanya mencakup pengetahuan akademis dan fakta, tetapi juga sebagai suatu proses, pengalaman, interaksi dengan teknologi, serta nilai-nilai budaya yang bersifat lokal serta global. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam kurikulum sekolah berasrama Islam dan kurikulum terkait agama, pengetahuan agama dan pengetahuan umum sering dibedakan sebagai dua bidang independen dengan landasan ontologis yang berbeda. Di era perubahan ini, sangat penting untuk menyadari bahwa pengetahuan agama dan pengetahuan umum saling melengkapi dan dapat mencakup realitas yang ada baik di tingkat lokal maupun global. (Liriwati, 2023).

Teknologi dan kecerdasan buatan bukan sekadar alat, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, realitas virtual, AI, dan kemampuan digital harus dipandang sebagai elemen yang membentuk pengetahuan yang dipelajari dan mendefinisikan perspektif siswa. Analisis ontologis kurikulum dalam lingkungan yang berubah dengan cepat membutuhkan pemeriksaan terperinci tentang apa yang sebenarnya dianggap "ada" dalam struktur dan praktik kurikulum. Salah satu pandangan berpendapat bahwa kurikulum harus dipandang sebagai kumpulan entitas formal yang saling terhubung. Dengan demikian, pendekatan ontologis memungkinkan deskripsi unit kompetensi, tujuan, dan penilaian dengan cara yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi baru. Sejalan dengan pandangan ini, Milosz (2024) mengoptimalkan model kurikulum yang menekankan pada kompetensi dengan garis besar ontologi yang menjelaskan

hubungan antara hasil pembelajaran, kegiatan belajar, dan penilaian. Dengan cara ini, kurikulum bisa dibangun kembali sebagai jaringan objek kompetensi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan di zaman disrupsi (Rismana & Hernawati, 2025).

Ketika teknologi cerdas itu diterapkan dalam suatu perubahan kurikulum, ini mengacu pada penggabungan AI dalam proses perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu dan relevansi pengalaman belajar dengan memanfaatkan kemampuan komputasi kecerdasan buatan, analisis data, serta sifat adaptif yang dimilikinya (Rismana & Hernawati, 2025).

Integrasi teknologi juga berdampak pada pengembangan kurikulum. Kurikulum yang sebelumnya berfokus pada hafalan kini perlu memasukkan keterampilan elektronik seperti literasi informasi, pemrograman, dan keamanan siber. Ada argumen bahwa memasukkan keterampilan abad ke-21 ke dalam kurikulum sangat penting untuk mengembangkan siswa yang dapat beradaptasi dengan tren globalisasi. Dalam pembelajaran dengan alat-alat canggih, peran guru sebagai instruktur sangat penting. TPACK (Teknologi, Pedagogi, dan Pengetahuan Konten) adalah kerangka kerja yang berguna bagi pendidik untuk memasukkan teknologi ke dalam kelas. Guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang cara mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi dan materi pengajaran mereka. (Rismana & Hernawati, 2025).

Kurikulum yang memperkuat ketahanan adalah kurikulum yang menyediakan kesempatan untuk pembelajaran sosial-emosional, penguatan personaliti, dan pengalaman belajar yang berdasarkan pada situasi nyata. Jenis kurikulum ini tidak terbatas pada pengembangan kognitif saja, tetapi juga berperan dalam membantu siswa mengenali dan mengatur emosi mereka, menyelesaikan perselisihan, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keberadaan struktur kurikulum yang memfasilitasi kemajuan karakter dan otonomi siswa sangat penting dalam konteks pendidikan di masa mendatang (Ardi et al., 2024).

Pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting dalam menyongsong era global dan revolusi industri 4. 0. Dalam iklim persaingan internasional, kualitas sumber daya manusia menjadi elemen kunci yang mempengaruhi daya saing negara. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan teknologi digital.

Kebijakan "kebebasan belajar" memberikan kesempatan untuk inovasi pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan karakteristik siswa (Karoluslina et al., 2026).

Perkembangan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa setiap perubahan kurikulum selalu terkait dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan zaman. Pada periode Orde Baru, fokus pendidikan adalah pada modernisasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas negara melalui sistem yang cenderung terpusat. Era ini ditandai dengan munculnya sejumlah kurikulum, seperti Kurikulum 1975, 1984, dan 1994. Walaupun berhasil meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sistem pendidikan pada waktu itu masih menekankan pada keseragaman dan kedisiplinan.

Memasuki periode reformasi, sistem pendidikan Indonesia mengalami transformasi besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, "Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional". Pendidikan mulai berfokus pada prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan pemerataan akses pendidikan. Perubahan kurikulum terus berlanjut, berevolusi dari Kurikulum Berbasis Kemampuan (KBK), KTSP (Kurikulum Berbasis Sekolah), Kurikulum 2013, dan akhirnya Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran fleksibel dan penguatan citra siswa Pancasila (Fauzan & Arifin, 2022).

Memasuki era 21, sistem pendidikan di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh globalisasi dan revolusi industri 4. 0 yang mengubah metode belajar, mengajar, serta cara mengakses informasi. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat pergeseran menuju digital dalam bidang pendidikan melalui pembelajaran daring. Semua ini menciptakan banyak kesempatan untuk inovasi dalam pembelajaran, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan digital antar daerah dan kekurangan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, adanya kurikulum yang bersifat adaptif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan tuntutan zaman modern. Kurikulum adaptif adalah suatu bentuk kurikulum yang dapat diubah, kuat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan ciri khas pendidikan itu sendiri. Kemampuan ini mencakup penyesuaian proses belajar dengan situasi lokal, nasional, dan internasional secara berimbang. Dengan adanya kurikulum yang adaptif, diharapkan para peserta didik dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah yang relevan dengan kebutuhan zaman (Solihutaufa & Azhari, 2026).

Kurikulum yang fleksibel menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dalam proses pembelajaran. Para pendidik memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memodifikasi materi, metode, dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik siswa. Hal ini membuat pembelajaran menjadi kurang seragam dan lebih responsif terhadap keragaman siswa dan perubahan masyarakat (Niemi, 2021).

Selain itu, keberhasilan penerapan kurikulum fleksibel tidak hanya bergantung pada pelatihan guru dan pengembangan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola perubahan kurikulum. Kepala sekolah memikul tanggung jawab penting dalam membimbing, mempromosikan, dan membangun budaya sekolah yang mendukung inovasi dalam pembelajaran dan memungkinkan implementasi perubahan kurikulum secara efektif (Lahiya et al., 2025).

Teknologi digital sangat penting untuk keberhasilan implementasi kurikulum yang dapat disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan telah menjadi isu mendesak di masa-masa yang penuh gejolak ini. Lebih lanjut, teknologi digital menyediakan infrastruktur dan perangkat yang memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa (Arifudin, 2025). Membangun infrastruktur seperti koneksi internet yang baik dan peralatan digital yang memadai merupakan persyaratan penting untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi secara optimal (Maphosa, 2021). Di sisi lain, keberadaan platform pembelajaran digital yang sering digunakan oleh guru dan siswa menunjukkan betapa dalamnya teknologi terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Literasi digital di kalangan guru dan siswa merupakan faktor penting yang memengaruhi sejauh mana teknologi dimanfaatkan. Ketika guru memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk menggunakan teknologi, dan siswa dapat mengakses dan beradaptasi dengan media digital, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, kurikulum yang fleksibel tidak hanya mengedepankan pencapaian akademik, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk bertahan, beradaptasi, dan membuat pilihan di tengah perubahan yang cepat dan tidak menentu. Kurikulum yang responsif terhadap kemajuan zaman seharusnya memperhatikan perbedaan karakteristik peserta didik, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan menciptakan sistem pendidikan yang adil serta berorientasi pada

kemanusiaan. Dalam hal ini, Merdeka Belajar dapat dipahami sebagai gabungan modern dari evolusi kurikulum di Indonesia yang berupaya untuk menggabungkan fleksibilitas, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan selalu berubah sebagai tanggapan terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Mulai dari Rentjana Pelajaran hingga Kurikulum Merdeka, setiap kurikulum hadir dengan karakter dan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu. Dalam konteks ini, CBSA dalam Kurikulum 1984 menjadi momen penting pergeseran paradigma dalam pembelajaran, dari yang berorientasi pada guru ke yang berorientasi pada siswa. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk secara aktif mengembangkan pengetahuan mereka melalui pengalaman belajar, interaksi sosial, dan berpikir kritis.

Namun, penerapan CBSA di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal dan praktik nyata dalam pendidikan. Ketidaksiapan guru, kurangnya fasilitas belajar, dan budaya belajar yang cenderung pasif menjadi penghalang utama keberhasilan dalam penerapan metode belajar aktif. Ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya perlu dilakukan di aspek administratif, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi guru, kesiapan infrastruktur, dan perubahan budaya belajar di sekolah.

Di era digital yang disruptif, tantangan pendidikan menjadi semakin kompleks karena perkembangan teknologi, arus informasi yang cepat, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum adaptif menjadi sangat penting untuk pendidikan di abad ke-21. Kurikulum harus tidak hanya fleksibel terhadap perubahan zaman, tetapi juga mampu menggabungkan literasi digital, keterampilan abad ke-21, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Dalam hal ini, Merdeka Belajar dapat dipahami sebagai bentuk sintesis modern yang menghidupkan kembali semangat pembelajaran aktif dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, diperlukan usaha berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperkuat kompetensi pedagogik guru, memastikan akses yang merata terhadap teknologi pendidikan, serta merancang kurikulum yang lebih mudah disesuaikan dan cepat menanggapi kebutuhan

siswa. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa dilakukan dengan meneliti penerapan kurikulum adaptif dan Merdeka Belajar untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamuddin. (2013). *SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA*.

Anam, M. S., & Solihah, M. (2024). *Memahami Kebijakan Kurikulum Nasional Tahun 1947 dan 1952*. *7*, 9313–9317.

Ardi, Z., Putra, A. H., & Mulia, F. D. (2024). *Resiliensi Akademik: Fondasi Sukses Pendidikan*. CV Eureka Media Aksara. https://books.google.co.id/books?id=a56TEQAAQBAJ

Arifudin, O. (2025). Why digital learning is the key to the future of education. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, *3*(4), 201–210.

Aziza, I. F. (2024). *REFORMULASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DISRUPSI DIGITAL*. *3*(2), 65–75.

Fauzan, & Arifin, F. (2022). *Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=q0x1EAAAQBAJ

Harahap, S. A., Hardiansyah, F., Rambe, S. A., Rahmayanty, D., Konadi, H., Fitria, U., Mendoza, W. D., & Haryanto, P. P. P. (2023). Belajar dan pembelajaran. *Penerbit Tahta Media*.

Hasibuan, A. T., Batubara, S. A., Khairani, M., & Siagian, E. A. (2024). *Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa:Studi Evaluasi*. *5*, 313–319.

Hikmawati, N., Sufiyanto, M. I., & Jamilah. (2023). *KONSEP DAN IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM MANAJEMEN KURIKULUM SD/MI*. *1*, 1–16.

Karoluslina, K., Mappanyompa, M., Puspitarini, H., Muhirdan, M., Arianto, T., Rahmi, S., Riyanti, A., & Nurjannah, D. R. (2026). *Pendidikan Indonesia Menuju Masa Depan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. https://books.google.co.id/books?id=NL2nEQAAQBAJ

Kerres, M., & Bedenlier, S. (n.d.). *Systematic Reviews in Educational*.

Khasbiyah, A., & Apriyani, D. (2025). *ANALISIS KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN DAMPAK PENDIDIKAN NILAI DALAM KURIKULUM NASIONAL: SEBUAH STUDI KEPUSTAKAAN*. *10*.

Lahiya, A., Arifudin, O., & Matiala, T. F. (2025). Education administration reform: A case study on the implementation of the Merdeka curriculum. *INJOSEDU: International Journal of Social and Education*, *2*(3), 555–565.

Liriwati, F. Y. (2023). *Transformasi Kurikulum ; Kecerdasan Buatan Untuk Membangun Pendidikan Yang Relevan di Masa Depan*. *1*, 62–71.

Mansur, Karadjo, M., & Fayuhi, F. (2025). *Transformasi Pendidikan Melalui Strategi Mutu yang Unggul di Kota Palu Educational Transformation Through Superior Quality Strategies in Palu City*. *8*(1), 837–845. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6869

Maphosa, V. (2021). Teachers' perspectives on remote-based teaching and learning in the COVID-19 era: Rethinking technology availability and suitability in Zimbabwe. *European Journal of Interactive Multimedia and Education*, *2*(1), e02105.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis*.

Mulyasa, E. (2012). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan*.

Niemi, K. (2021). 'The best guess for the future?'Teachers' adaptation to open and flexible learning environments in Finland. *Education Inquiry*, *12*(3), 282–300.

Paul, J., & Rialp, A. (2020). *The art of writing literature review : What do we know and what do we need to know ?*

Pohan, I. S., Afifah, N., & Charisma, B. (2025). *Teachers ' Perceptions Of Changes In Students ' Attitudes Toward Teacher Authority In The Modern Era*. *1*, 297–304.

Putra, F. S., Basyori, A., & Budianto, A. (2026). *Development of the National Education Curriculum from the Old Order Era to the Reform and Decentralization Era (1947-2022)*. *10*(2), 817–829. https://doi.org/10.36526/js.v3i2.6489

Rismana, N., & Hernawati, S. (2025). *Pengembangan Kurikulum di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan Abad Ke-21*. *12*(1), 1–8.

Rusman, M. P. (2017). *Belajar & pembelajaran: Berorientasi standar proses pendidikan*. Prenada Media.

Sanjaya, D. H. W. (2006). *Strategi pembelajaran berorentasi standar proses pendidikan*.

Sardiman, A. M. (2011). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*.

Solihutaufa, E., & Azhari, H. (2026). *FILSAFAT KURIKULUM*. Goresan Pena. https://books.google.co.id/books?id=n6XEEQAAQBAJ

Subkhan, E. (2018). *IDEOLOGI, KEKUASAAN, DAN PENGARUHNYA PADA ARAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (1950-1965)*. *7*(1).

Sudiana, I. N., & Putrayasa, I. B. (2024). *Dampak Pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Berbasis Kearifan Lokal terhadap Karakter Siswa di Sekolah Dasar*. *4*, 1833–1843.

Sulmi, & Bahri. (2025). *Kurikulum Sejarah di Indonesia Tahun 1947-1965*. *4*(7), 1575–1585.

Wahyudiono, A. (2023). *PERKEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM TANTANGAN ERA SOCIETY 5.0*. 124–131.

Zaimarni, Asyhar, R., Asrial, & Syaiful. (2025). *ANALISIS KURIKULUM SEKOLAH MENGHADAPI ERA DISRUPSI*. *19*(2), 245–262.